



- URUSAN PEMERINTAHAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas / Balai / Cabang Dinas : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Program** : **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
- A. Kegiatan** : **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**
- Sub Kegiatan** : **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**
- Indikator Sub keg** : **Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya**
- Dukungan terhadap Indikator Program (Nilai survey kepuasan komunikasi publik)** :
- Penyelenggaraan pertemuan pelaku kehumasan pemerintah sebanyak 2 kali setahun;
- Penyelenggaraan fasilitasi uji kompetensi wartawan dan jurnalis sebanyak 1 kali dalam setahun.
- B. Sasaran** :
1. Pelaku kehumasan pemerintah di Jawa Tengah;
2. Komunitas wartawan/jurnalis di Jawa Tengah;
- C. Output Kegiatan**
1. Satuan : Orang
2. Lokasi :
1. Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah
- D. Latar Belakang kondisi existing** :
a. Partisipasi kegiatan pertemuan kehumasan masih belum optimal, karena ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang tidak hadir, dan belum melibatkan instansi pemerintah pusat dan instansi vertikal lainnya;
b. Perlu dilakukan sinkronisasi berkala terhadap komunitas kehumasan seluruh instansi di Provinsi Jawa Tengah;
c. Sinergi dan koordinasi antar lembaga pengelolaan kehumasan di lingkup Pemerintah Prov. Jawa Tengah dengan kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dan instansi terkait perlu ditingkatkan;
- Gambaran Kesenjangan (permasalahan)** :
a. Belum semua SKPD Pemprov Jateng terdapat lini kerja di bidang kehumasan atau pranata humas yang bertugas untuk mengampu layanan informasi SKPD;
b. Masih ada perbedaan lini organisasi pengelola kehumasan antar pemerintah daerah, seperti adanya bagian/biro humas dan dinas komunikasi informatika;

c. Integrasi tujuan dan bauran diseminasi informasi belum optimal dan masih parsial;

E. Lingkup Kegiatan

- : a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
- meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku kehumasan di Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
 - Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
 - Menjalin komunikasi antara petugas kehumasan dan jurnalis
- b. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
- Swakelola dan kontraktual (pengadaan langsung/e-purchasing)
- c. Kebutuhan Waktu : 12 bulan
- d. Siapa yang terlibat :
- SKPD Pemprov Jateng,
 - Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah,
 - komunitas kehumasan
 - komunitas wartawan/jurnalis

F. Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

1. Kebutuhan Belanja Pegawai : - PNS dan Non PNS Bidang Informasi & Komunikasi Publik
 2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar : - Pranata Humas
- Administrasi
- Pakar/Ahli Komunikasi Publik
- Analisis Kebijakan/Analisis Publikasi
 3. Koordinasi : **Rencana Koordinasi :**
 - Melakukan pemetaan terhadap jumlah pranata humas di Jawa Tengah.
 - Melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD Pemprov. Jateng, terhadap potret pemberdayaan pranata humas;
 - Melaksanakan koordinasi sebagai tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - Melakukan kerjasama kehumasan dengan seluruh pelaku humas di Jateng;
 4. Tinjauan Lapangan : Rencana dan Tujuan Tinjauan Lapangan :
 1. Untuk menjalin koordinasi dan kerjasama kehumasan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 2. Menjalin koordinasi dengan pelaku jurnalistik;
- Pihak yang terlibat :
1. PNS dan Non PNS Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ;
 2. SKPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah;
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 4. Komunitas Kehumasan

5. Komunitas Wartawan/Jurnalis

Keluaran/ Output : - Terselenggaranya pertemuan komunitas kehumasan sebanyak 2 kali setahun;
- Penyelenggaraan fasilitasi uji kompetensi wartawan sebanyak 1 kali dalam setahun

Hasil/ Outcome : - Meningkatnya kemampuan wartawan dan sumberdaya kehumasan lainnya di Jawa Tengah;
- Terbangunnya citra positif instansi pemerintah;
- Dukungan terhadap capaian indeks kemerdekaan pers;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap informasi yang disediakan pemerintah;

Kebutuhan Belanja Modal :

1. Kebutuhan / dukungan alat / barang
 - Belanja pegawai (honor pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan)
 - Belanja Barang/Jasa

G. Anggaran dan Target : Tahun 2024 : Rp. 350.000.000 ,-
Tahun 2025 : Rp. 400.000.000,-
Tahun 2026 : Rp. 450.000.000 ,-

Semarang, Desember 2023

Disusun dan diketahui oleh :
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi



Moch Faizin, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19731119 199403 1 005